



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIRECTOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI PURNOMO
2. Jabatan : DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT
3. NHK : 183079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 937 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/500 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 14000 m2/500 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
6. Tanah Seluas 1674 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 355.100.000

1. MOBIL, VW SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, VW COMBI MINIBUS Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, VW SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. LAINNYA, ---(SEPEDA) SEPEDA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.520.140.434
F. HARTA LAINNYA	Rp.	22.978.000.000
Sub Total	Rp.	36.187.240.434
III. HUTANG	Rp.	3.423.973.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	32.763.266.934

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.